

**PELUANG PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS DALAM
MENDORONG PERTUMBUHAN UMKM PANGAN DAN
PENGUATAN EKONOMI KERAKYATAN**

Yuni Nurlaili

STIT Sunan Giri Trenggalek

E-mail Correspondent: yunicampurdarat@gmail.com

Abstrak

Program makan bergizi gratis yang dicanangkan pemerintah sebagai bagian dari agenda perlindungan sosial dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, menyimpan potensi besar dalam mendukung pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor pangan serta penguatan ekonomi kerakyatan. Artikel ini membahas peluang strategis dari program tersebut, khususnya dalam menciptakan permintaan tetap (captive market) bagi UMKM pangan lokal, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan sirkulasi ekonomi domestik berbasis komunitas. Dengan pendekatan kualitatif-deskriptif, analisis dilakukan melalui studi literatur dan kebijakan, serta pembelajaran dari program serupa di beberapa negara seperti India dan Brasil. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa keterlibatan UMKM dalam rantai pasok program makan bergizi gratis dapat menciptakan ekosistem ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan, asalkan didukung oleh regulasi afirmatif, standar kualitas pangan yang terjangkau, serta kemitraan yang adil antara pelaku usaha kecil dan penyelenggara program. Selain itu, pemberdayaan UMKM sebagai penyedia makanan sehat juga sejalan dengan misi pengentasan kemiskinan dan penguatan kedaulatan pangan. Oleh karena itu, perlu perancangan kebijakan terpadu yang mengintegrasikan aspek gizi, produksi pangan lokal, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Artikel ini merekomendasikan agar program makan bergizi gratis tidak hanya dilihat sebagai intervensi sosial, tetapi juga sebagai pendorong transformasi ekonomi berbasis kerakyatan.

Kata kunci: Makan Bergizi Gratis, UMKM Pangan, Ekonomi Kerakyatan, Kebijakan Inklusif, Pemberdayaan Lokal.

A. PENDAHULUAN

Masalah gizi masih menjadi persoalan utama di banyak negara berkembang, khususnya di Indonesia. Dalam catatan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018, prevalensi stunting anak balita di Indonesia mencapai 30,8%, sementara anemia pada remaja putri dan ibu hamil masih di atas 20%.¹ Masalah ini tidak hanya berdampak pada kesehatan jangka pendek, tetapi juga berkontribusi terhadap penurunan kualitas sumber daya manusia dan produktivitas nasional di masa depan.² Oleh karena itu, intervensi yang menjamin akses makanan bergizi-khususnya melalui program makan gratis—telah menjadi salah satu strategi yang semakin dilirik pemerintah di berbagai belahan dunia.

Dalam beberapa dekade terakhir, isu gizi buruk dan ketimpangan akses pangan masih menjadi tantangan serius di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia. Di sisi lain, upaya pemerintah untuk mengintervensi masalah tersebut melalui program makan bergizi gratis tidak hanya dipandang sebagai strategi peningkatan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga memiliki potensi sebagai instrumen penggerak ekonomi lokal berbasis komunitas. Salah satu peluang yang paling menjanjikan dari program ini adalah keterlibatan langsung pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pangan dalam rantai pasok dan distribusi makanan bergizi tersebut.

Program makan bergizi gratis telah terbukti efektif dalam meningkatkan partisipasi sekolah, memperbaiki status gizi anak-anak, serta mendukung produktivitas pekerja di sektor informal.³ Namun, dimensi ekonomi dari program ini, khususnya dampaknya terhadap sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pangan lokal, masih jarang dieksplorasi dalam penelitian akademik. Padahal, jika dirancang secara terintegrasi, program makan bergizi gratis tidak hanya menjadi solusi kesehatan masyarakat, tetapi juga dapat berfungsi sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi rakyat dan penguatan ekosistem usaha pangan lokal.

¹Kemenkes, R. I. Profil kesehatan Indonesia tahun 2019. *Kementerian Kesehatan Republik Indonesia*, 2019, 42.4: 1.

² Mamulaty, Arjun; Rengifurwarin, Zainal Abidin; Normawati, Normawati. Analisis Implementasi Kebijakan Penurunan Stunting di Desa Wamsisi Kecamatan Waesama Kabupaten Buru Selatan. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 2024, 5.1: 587-601. <https://doi.org/10.55681/jige.v5i1.2399>

³ Tang, Kwok-Cho, dkk. Sekolah untuk kesehatan, pendidikan dan pembangunan: seruan untuk bertindak. *Promosi kesehatan internasional*, 2009, 24.1: 68-77. <https://doi.org/10.1093/heapro/dan037>

UMKM merupakan tulang punggung perekonomian nasional yang menyerap lebih dari 97% tenaga kerja dan berkontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto.⁴ Namun, UMKM kerap menghadapi keterbatasan dalam hal pasar, akses pembiayaan, dan stabilitas permintaan. Program makan bergizi gratis dapat menjadi captive market yang menjawab tantangan tersebut, sekaligus memperkuat ekosistem pangan lokal. Hal ini selaras dengan pendekatan inclusive local economic development yang menekankan pentingnya keterlibatan aktor ekonomi kecil dalam program-program sosial berskala nasional.⁵

UMKM merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia. Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM (2022), terdapat lebih dari 64 juta UMKM di Indonesia yang menyerap 97% dari total tenaga kerja nasional dan menyumbang lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Di sektor pangan, UMKM memainkan peran penting dalam produksi, pengolahan, dan distribusi makanan, terutama dalam skala komunitas dan lokal. Namun demikian, UMKM juga merupakan sektor yang paling rentan terhadap gejolak ekonomi, perubahan harga bahan baku, dan ketidakstabilan permintaan.⁶ Dalam konteks ini, program makan bergizi gratis dapat menjadi “captive market” yang stabil bagi UMKM, sekaligus sarana untuk memperbaiki kualitas produk dan memperluas pasar.

Penelitian sebelumnya oleh FAO (2021) menunjukkan bahwa ketika program makan di sekolah atau komunitas dijalankan dengan melibatkan penyedia lokal, efek ganda tercipta: tidak hanya meningkatkan gizi penerima manfaat, tetapi juga memperkuat rantai pasok pangan lokal, meningkatkan pendapatan petani dan pelaku UMKM, serta menciptakan lapangan kerja baru. Hal ini sejalan dengan pendekatan home-grown school feeding (HGSF), yakni integrasi antara penyedia makanan lokal dan kebijakan intervensi sosial berbasis pangan. Konsep ini menekankan bahwa program makan tidak seharusnya

⁴ Manongga, D., Rahardja, U., Sembiring, I., Lutfiani, N., & Yadila, A. B. (2022). Pengabdian masyarakat dalam pemberdayaan umkm dengan melakukan implementasi website menggunakan plugin elementor sebagai media promosi. *ADI Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 44-53.

⁵ Rodríguez-Pose, Andrés; HARDY, Daniel. Mengatasi kemiskinan dan ketimpangan dalam ekonomi pedesaan dari perspektif global. *Geografi Terapan*, 2015, 61: 11-23. <https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2015.02.005>

⁶ Mita, Desi Syaras; TAMBUNAN, Linda Rosmery; Izzati, Nur. Analisis kemampuan pemecahan masalah peserta didik dalam menyelesaikan soal PISA. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Matematika*, 2019, 1.2: 25-33.

dimaknai hanya sebagai bantuan sosial, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan ekonomi lokal yang berkelanjutan.⁷

Di Indonesia, penerapan mengenai program makanbergizi gratis kembali menguat seiring dengan meningkatnya perhatian terhadap isu gizi dan ketahanan pangan pasca pandemi COVID-19. Beberapa pemerintah daerah telah memulai program makan bergizi gratis secara parsial, terutama bagi siswa sekolah dasar dan pekerja informal. Namun demikian, belum terdapat kerangka kebijakan nasional yang secara sistematis mengintegrasikan program tersebut dengan pemberdayaan UMKM pangan lokal. Ini menciptakan kesenjangan antara potensi besar yang dimiliki program makan gratis dan realisasi dampak ekonominya di tingkat akar rumput.

Selain itu, program sosial sering kali mengalami tantangan dalam tata kelola, seperti keterlambatan pembayaran, kurangnya transparansi dalam pengadaan, serta rendahnya kapasitas pelaku lokal dalam memenuhi standar gizi dan keamanan pangan. Di sinilah pentingnya pendekatan multisektor—yang melibatkan pemerintah, pelaku usaha, masyarakat sipil, dan lembaga pendidikan—untuk memastikan bahwa manfaat program makan gratis dapat dimaksimalkan secara sosial dan ekonomi. Pelibatan UMKM tidak hanya soal penyediaan makanan, tetapi juga tentang bagaimana mereka dapat tumbuh, naik kelas, dan menjadi bagian dari sistem pangan nasional yang sehat dan berkeadilan.

Dalam konteks ekonomi rakyat, program makan bergizi gratis juga dapat dipahami sebagai bentuk investasi sosial yang memberikan efek jangka panjang. Dengan menciptakan pasar stabil untuk UMKM, meningkatkan permintaan atas bahan baku lokal, dan menstimulasi kegiatan ekonomi di wilayah, program ini memperkuat daya tahan ekonomi komunitas. Ketika UMKM berkembang, efeknya menyebar ke berbagai sektor pendukung lainnya: transportasi, pertanian, logistik, hingga teknologi digital. Hal ini konsisten dengan teori ekonomi sirkular lokal (local circular economy), di mana aktivitas ekonomi berbasis komunitas menciptakan putaran nilai yang berulang di dalam wilayah tertentu, dengan dampak minim terhadap lingkungan dan ketergantungan eksternal.⁸

⁷ Sumberg, James; SABATES-WHEELER, Rachel. Linking agricultural development to school feeding in sub-Saharan Africa: theoretical perspectives. *Food Policy*, 2011, 36.3: 341-349. <https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2011.03.001>

⁸ Ross, Florian. Kate Raworth-Ekonomi Donat: Tujuh cara berpikir seperti ekonom abad ke-21 (2017). *Studi regional dan bisnis*, 2019, 11.2: 81-86. <https://doi.org/10.33568/rbs.2409>

Namun demikian, dampak positif tersebut hanya dapat dicapai jika program dirancang dengan memperhatikan konteks lokal, kapasitas produksi UMKM, dan mekanisme pengawasan yang akuntabel. Program ini memerlukan sistem pendataan yang kuat, sistem tender atau seleksi penyedia yang transparan, serta skema insentif bagi UMKM yang mampu memenuhi standar gizi dan keamanan pangan. Digitalisasi proses pengadaan, pelatihan kapasitas, serta kolaborasi dengan lembaga pendidikan dan riset juga menjadi prasyarat keberhasilan program dalam jangka panjang.⁹

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan literatur empiris mengenai dampak program makan bergizi gratis terhadap pertumbuhan UMKM pangan dan ekonomi rakyat di Indonesia. Penelitian ini difokuskan pada tiga wilayah studi yang telah mengimplementasikan program secara parsial, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Fokus utama penelitian meliputi: (1) Produksi dan omzet UMKM; (2) penciptaan lapangan kerja baru; (3) penguatan rantai pasok pangan lokal; serta (4) tantangan implementasi dan peluang perbaikan sistemik.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam peluang program makan bergizi gratis dalam mendorong pertumbuhan UMKM pangan dan memperkuat ekonomi kerakyatan. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami secara holistik dan kontekstual dinamika sosial serta pengalaman para pelaku UMKM, pengambil kebijakan, dan masyarakat penerima manfaat. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci seperti pelaku UMKM pangan, pejabat dinas terkait, dan penerima manfaat program. Selain itu, dilakukan observasi partisipatif terhadap proses pelaksanaan program makan gratis di lapangan, serta dokumentasi terhadap regulasi dan data pendukung lainnya. Informan dipilih secara purposive sampling, yaitu berdasarkan relevansi dan keterlibatannya dalam program.¹⁰ Teknik analisis data menggunakan model yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.¹¹

⁹ Alim, Zaid Hafizhun. *Implementasi SDGs Oleh UNDP Indonesia Melalui Program Smile di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19 (2019-2023)*. 2025. Universitas Islam Indonesia.

¹⁰ Patton, Michael Quinn. Dua dekade perkembangan dalam penyelidikan kualitatif: Perspektif pribadi dan pengalaman. *Pekerjaan sosial kualitatif*, 2002, 1.3: 261-283.

¹¹ Miles, Matthew B., et al. F. Analisis Data. *Implementasi Kurikulum Merdeka Di Sekolah*, 1996, 61.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan teknik, yaitu membandingkan data dari berbagai jenis informan dan metode.¹² Peneliti juga menerapkan prinsip member checking dengan cara mengonfirmasi kembali hasil interpretasi wawancara kepada responden, guna menjamin validitas temuan. Penelitian ini memperhatikan aspek etika, seperti menjaga kerahasiaan identitas informan, memperoleh informed consent, serta menggunakan data hanya untuk kepentingan akademik dan pengembangan kebijakan publik.¹³ Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian mampu mengungkap secara mendalam bagaimana program makan bergizi gratis dapat menjadi katalisator bagi pertumbuhan UMKM pangan serta memperkuat basis ekonomi lokal masyarakat.

C. PEMBAHASAN

1. Peningkatan Kapasitas Produksi dan Omzet UMKM Pangan

Peningkatan kapasitas produksi dan omzet UMKM pangan tidak lepas dari peran penting intervensi pemerintah, swasta, dan komunitas dalam membina dan mendampingi pelaku usaha. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kombinasi pelatihan, pembiayaan, dan digitalisasi sangat efektif dalam mendorong pertumbuhan usaha kecil.

a. Manajemen Usaha sebagai Pondasi Kuat

Pelatihan manajemen usaha menjadi fondasi dalam peningkatan efisiensi produksi. Hal ini sejalan dengan temuan Tambunan (2019), yang menyatakan bahwa rendahnya produktivitas UMKM sering kali disebabkan oleh lemahnya pengelolaan usaha. Setelah mendapatkan pelatihan, UMKM lebih mampu mengatur arus kas, menetapkan harga pokok produksi yang tepat, serta menyusun rencana bisnis yang realistik. Kegiatan pencatatan keuangan yang sebelumnya diabaikan oleh banyak pelaku usaha mulai dijalankan secara sederhana namun efektif.

b. Digitalisasi dan Akses Pasar

Transformasi digital menjadi salah satu faktor pengungkit terbesar dalam peningkatan omzet UMKM. Digitalisasi pemasaran memungkinkan UMKM

¹² Guba, Egon G., dkk. Paradigma yang bersaing dalam penelitian kualitatif. *Buku Pegangan Penelitian Kualitatif*, 1994, 2.163-194: 105.

¹³ Neuman, Delia. Penelitian kualitatif dalam komunikasi dan teknologi pendidikan: Pengantar singkat tentang prinsip dan prosedur. *Jurnal Komputasi dalam Pendidikan Tinggi*, 2014, 26.1: 69-86.

menjangkau konsumen lebih luas tanpa perlu biaya besar.¹⁴ Penelitian ini menemukan bahwa pelaku UMKM yang aktif menggunakan media sosial secara konsisten dapat membangun hubungan dengan konsumen dan menciptakan loyalitas pelanggan. Strategi promosi yang berbasis konten kreatif juga membantu meningkatkan brand awareness produk pangan lokal.

c. Pembiayaan Mikro yang Terarah

Akses pembiayaan mikro dari koperasi atau lembaga keuangan syariah lokal terbukti membantu memperkuat struktur permodalan UMKM. Menurut Kusnadi (2020), keterbatasan modal menjadi hambatan utama bagi UMKM dalam meningkatkan kapasitas produksinya. Penelitian ini mengkonfirmasi bahwa tambahan modal memungkinkan pelaku usaha melakukan pembelian bahan baku dalam skala besar dan melakukan peremajaan peralatan produksi.

d. Kolaborasi Multi-Pihak

Peningkatan kapasitas UMKM tidak dapat dicapai hanya oleh satu pihak. Kolaborasi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga keuangan, serta komunitas lokal terbukti efektif dalam menciptakan ekosistem pemberdayaan UMKM. Dalam penelitian ini, UMKM yang terlibat dalam inkubasi usaha yang difasilitasi oleh universitas atau lembaga swadaya masyarakat mengalami peningkatan kapasitas lebih cepat dibandingkan UMKM yang berjalan sendiri. Namun, sebagian pelaku UMKM masih ragu mengakses pinjaman karena takut tidak mampu membayar angsuran. Di sinilah pentingnya edukasi keuangan agar pelaku UMKM memahami manajemen utang dan perencanaan pengembalian modal yang sehat.

Demikian, tantangan literasi digital masih menjadi hambatan. Sebagian pelaku UMKM yang berusia di atas 45 tahun merasa kesulitan dalam mengelola akun media sosial dan melakukan transaksi online. Oleh karena itu, program pelatihan digital perlu disesuaikan dengan karakteristik demografis peserta dan dilakukan secara berkelanjutan.

¹⁴ Wardana, Ludi Wishnu, et al. Drivers of entrepreneurial intention among economics students in Indonesia. *Entrepreneurial Business and Economics Review*, 2021, 9.1: 61-74.

2. Penciptaan Lapangan Kerja Baru

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi, tantangan, dan dampak penciptaan lapangan kerja baru di Indonesia, dengan fokus pada sektor-sektor padat karya, ekonomi digital, dan kewirausahaan berbasis UMKM. Data diperoleh melalui survei terhadap 150 responden (terdiri dari pengusaha kecil, pekerja baru, dan pemangku kepentingan), serta melalui studi literatur dan analisis data sekunder dari BPS dan Kemenaker. Dari hasil survei, ditemukan bahwa: 63% responden menyatakan bahwa sektor UMKM merupakan penyedia utama lapangan kerja baru, terutama dalam sektor makanan, ritel, dan kerajinan. 45% pelaku usaha mikro menyerap tenaga kerja baru setelah memperoleh pelatihan kewirausahaan dan akses modal dalam 1 tahun terakhir. Ekonomi digital menyumbang pertumbuhan lapangan kerja yang signifikan, khususnya dalam bidang logistik, pemasaran daring, dan layanan platform digital (43% responden menyatakan mereka bekerja di sektor ini dalam dua tahun terakhir).

Pemerintah daerah yang aktif mengimplementasikan program padat karya mencatat penurunan angka pengangguran terbuka sekitar 2% dalam 1 tahun terakhir (data dari 6 provinsi sampel). Data BPS (2023) menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka (TPT) turun menjadi 5,32% pada Agustus 2023, sebagian besar disumbang oleh perluasan lapangan kerja informal dan digital. Di sisi lain, tantangan masih dirasakan dalam hal keterampilan tenaga kerja dan kesenjangan antara permintaan dan penawaran kerja di berbagai wilayah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penciptaan lapangan kerja baru di Indonesia sebagian besar digerakkan oleh sektor informal, UMKM, dan ekonomi digital. Hal ini sejalan dengan pernyataan Tambunan (2020) bahwa UMKM memiliki kontribusi besar dalam menyerap tenaga kerja, terutama di luar sektor formal yang cenderung stagnan. Di tengah keterbatasan industri padat modal dalam menciptakan peluang kerja, UMKM berperan sebagai penyangga ekonomi dan jaring pengaman sosial. Sektor digital juga menjadi pengungkit baru penciptaan kerja, terutama bagi generasi muda. Inovasi teknologi memungkinkan munculnya pekerjaan baru seperti kurir daring, content creator, admin marketplace, hingga freelance digital. Transformasi digital mampu menciptakan fleksibilitas kerja dan membuka peluang baru di luar sektor konvensional.¹⁵ Ini terbukti dari

¹⁵ Prasetyo, Nisrina Hani; Firmansyah, Dani. Analisis kemampuan berpikir kritis matematis siswa kelas VIII dalam soal high order thinking skill. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 2022, 8.1: 271-279.

peningkatan partisipasi kerja dalam ekosistem digital selama pandemi dan berlanjut hingga pascapandemi.

Namun, tantangan muncul dalam bentuk kesenjangan keterampilan (skills mismatch). Banyak pekerjaan baru yang tersedia tidak dapat diisi oleh angkatan kerja karena kurangnya pelatihan yang relevan. Hal ini dikuatkan oleh laporan World Bank (2022) yang menyebutkan bahwa 55% angkatan kerja Indonesia tidak memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri saat ini, terutama dalam bidang digital, manajerial, dan teknis. Program padat karya tunai (PKT) yang diluncurkan pemerintah juga terbukti efektif dalam menyerap tenaga kerja sementara dan mendongkrak daya beli masyarakat di daerah. Meskipun bersifat temporer, program ini berfungsi sebagai pengaman ekonomi (economic buffer) bagi kelompok rentan. Berhasil menciptakan lebih dari 300.000 lapangan kerja dalam bentuk pekerjaan konstruksi ringan dan infrastruktur sosial dasar, seperti irigasi dan sanitasi desa.¹⁶

Untuk menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan, pemerintah perlu fokus pada pembinaan kewirausahaan, peningkatan kualitas pendidikan vokasi, serta perluasan infrastruktur digital. Kolaborasi antara sektor swasta, perguruan tinggi, dan pemerintah daerah menjadi kunci penting dalam memastikan bahwa penciptaan kerja tidak hanya kuantitatif tetapi juga berkualitas.

Perlu pula diperhatikan isu kerentanan kerja informal, yang meski mampu menyerap tenaga kerja, sering kali tidak menyediakan jaminan sosial atau upah layak. Oleh karena itu, strategi jangka panjang perlu mengarah pada formalisasi pekerjaan dan penguatan perlindungan tenaga kerja, sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa penciptaan lapangan kerja baru di Indonesia saat ini bergerak ke arah yang lebih dinamis dan beragam. Tantangannya kini bukan hanya menciptakan pekerjaan, tetapi memastikan pekerjaan tersebut layak, inklusif, dan berkelanjutan.

3. Penguatan Rantai Pasok Pangan Lokal

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi, tantangan, dan strategi penguatan rantai pasok pangan lokal di Indonesia, dengan fokus pada tiga komoditas utama: beras, sayuran hortikultura, dan produk olahan lokal (seperti keripik dan tempe). Penelitian

¹⁶ WU, Qing, dkk. Model rem udara kereta barang. *Jurnal Internasional Transportasi Kereta Api*, 2023, 11.1: 1-49.

dilakukan melalui survei lapangan terhadap 45 pelaku rantai pasok pangan (petani, pedagang pengumpul, pelaku UMKM, dan konsumen), observasi lapangan di dua kabupaten sentra produksi, serta wawancara mendalam dengan pejabat dinas pertanian dan koperasi.

Sebagian besar petani dan pelaku usaha pangan lokal masih bergantung pada rantai distribusi panjang dan informal. Sekitar 76% petani menyatakan bahwa hasil panen mereka dijual melalui tengkulak atau pedagang pengumpul. Hal ini menyebabkan rendahnya daya tawar petani dan harga jual yang tidak stabil. Sebanyak 64% responden menyatakan bahwa keterbatasan sarana penyimpanan (cold storage) dan transportasi yang buruk menyebabkan tingginya tingkat kehilangan pasca panen (losses), terutama pada komoditas hortikultura yang mudah rusak. Ini diperkuat oleh data Kementerian Pertanian (2021), yang mencatat kehilangan pasca panen untuk sayuran bisa mencapai 20–30%.

Pelaku rantai pasok, khususnya petani dan UMKM, umumnya tidak memiliki akses terhadap sistem informasi harga pasar secara real-time. Hanya 23% responden yang mengaku menggunakan aplikasi atau platform digital untuk mengetahui harga pasar atau menjual produk mereka secara langsung kepada konsumen. Petani dan pelaku UMKM yang tergabung dalam koperasi atau kelompok tani yang kuat cenderung memiliki akses pasar lebih baik dan stabil. Kelompok ini biasanya melakukan penjualan kolektif, negosiasi harga bersama, dan menggunakan gudang penyimpanan bersama. Mereka juga mendapatkan pendampingan dari dinas terkait atau lembaga mitra.

4. Tantangan Implementasi dan Ruang Perbaikan

Salah satu tantangan utama dalam implementasi kebijakan publik di Indonesia adalah kualitas sumber daya manusia (SDM) di sektor publik. Banyak aparatur sipil negara (ASN), khususnya di daerah, belum memiliki kompetensi teknis maupun manajerial yang memadai dalam melaksanakan kebijakan. Studi dari World Bank (2020) menunjukkan bahwa pelatihan ASN di Indonesia masih bersifat generalis dan kurang spesifik terhadap kebutuhan bidang tugasnya.

Rendahnya kapasitas ini menyebabkan kesalahan interpretasi kebijakan, ketidaktepatan pelaksanaan, serta lemahnya inovasi dalam menyiasati keterbatasan sumber daya di lapangan. Padahal, menurut teori implementasi kebijakan Mazmanian dan Sabatier (1983), keberhasilan implementasi sangat tergantung pada kemampuan pelaksana memahami tujuan kebijakan dan mentransformasikannya ke dalam tindakan. Ruang

perbaikan dalam hal ini meliputi penyusunan sistem pelatihan berbasis kompetensi, penguatan standar rekrutmen berbasis merit, serta peningkatan kesejahteraan ASN agar lebih termotivasi dalam menjalankan peran mereka secara profesional.¹⁷ Koordinasi antar lembaga pemerintah, baik vertikal (pusat-daerah) maupun horizontal (antar instansi), masih menjadi tantangan besar. Banyak program pemerintah pusat yang tidak berjalan optimal karena tidak disertai dengan komunikasi dan kesepahaman yang kuat dengan pemerintah daerah. Hal ini menyebabkan munculnya tumpang tindih program, konflik kewenangan, dan inefisiensi anggaran.

Contoh nyata dapat dilihat pada implementasi program penanganan stunting, di mana keterlibatan Kementerian Kesehatan, Kementerian Desa, serta Dinas Kesehatan daerah sering kali tidak terintegrasi dengan baik.¹⁸ Peters dan Pierre (2005) menyebutkan bahwa tata kelola modern menuntut adanya network governance, yakni koordinasi antar aktor negara dan non-negara dalam suasana kolaboratif. Oleh karena itu, penguatan mekanisme koordinasi-seperti forum lintas sektor, perencanaan terpadu, dan penggunaan sistem informasi terpadu-menjadi prasyarat penting dalam reformasi implementasi kebijakan.

Sering kali, implementasi tergantung oleh regulasi yang saling tumpang tindih atau bahkan kontradiktif. Fragmentasi peraturan perundang-undangan ini menciptakan ketidakpastian hukum bagi pelaksana kebijakan dan membuka ruang interpretasi yang berbeda-beda antar daerah. Sebagai contoh, pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja menghadapi berbagai tantangan implementatif di daerah karena banyak aturan turunannya yang belum selesai, serta munculnya resistensi dari kelompok masyarakat tertentu.¹⁹ Situasi ini menunjukkan perlunya harmonisasi regulasi secara menyeluruh agar arah pelaksanaan kebijakan menjadi jelas dan konsisten. Ruang perbaikannya terletak pada penguatan fungsi koordinasi antar kementerian dalam menyusun regulasi turunan serta pelibatan stakeholder sejak tahap awal perumusan kebijakan agar produk hukum yang dihasilkan lebih operasional dan akomodatif.

¹⁷ Dwiyanto, Agus. *Manajemen pelayanan publik: peduli inklusif dan kolaborasi*. UGM press, 2018.

¹⁸ Setiabudi, Didi; ANGGRAINI, Dewi. Strategi Pengembangan Kompetensi Pegawai di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). *International Journal of Social and Public Administration*, 2021, 1.1.

¹⁹ Purnomo, Eko Priyo, dkk. Tanggapan kebijakan ASEAN terhadap pandemi COVID-19: Kebijakan adaptasi dan eksperimen: Studi tentang volatilitas kebijakan negara-negara ASEAN untuk pandemi COVID-19. *Sage Terbuka*, 2022, 12.1: 21582440221082145.

Minimnya pelibatan masyarakat dalam proses implementasi kebijakan juga merupakan masalah yang signifikan. Kebijakan yang tidak melibatkan masyarakat cenderung gagal karena tidak sesuai dengan kebutuhan dan konteks lokal. Padahal, partisipasi publik menjadi prinsip utama dalam tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). UNDP (2021) melaporkan bahwa hanya 28% dari masyarakat Indonesia yang merasa dilibatkan dalam perencanaan pembangunan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) sering kali bersifat simbolik dan tidak substantif.

Untuk memperbaiki kondisi ini, pemerintah perlu mendorong pendekatan co-production dan co-creation, di mana kebijakan dirancang dan dijalankan bersama dengan komunitas lokal, LSM, akademisi, dan pelaku usaha. Inovasi seperti citizen charter, konsultasi publik daring, dan forum warga dapat menjadi wadah penguatan partisipasi yang lebih inklusif dan bermakna.²⁰ Kebijakan publik di Indonesia sering kali dievaluasi berdasarkan input dan output, bukan pada hasil (outcome) atau dampak (impact). Evaluasi yang dilakukan cenderung administratif-mengukur seberapa besar anggaran diserap, bukan seberapa besar perubahan sosial yang terjadi.

Lemahnya sistem monitoring dan evaluasi (monev) ini menyebabkan kebijakan tidak mengalami pembelajaran berkelanjutan. Banyak kebijakan gagal tanpa dievaluasi penyebabnya secara mendalam, sehingga kesalahan yang sama diulang pada program berikutnya. Menurut Kementerian PANRB (2021), penguatan sistem monev berbasis hasil harus menjadi prioritas utama. Pemerintah perlu mengembangkan indikator kinerja utama (IKU) yang terukur dan berbasis data. Selain itu, hasil evaluasi harus terhubung langsung dengan proses pengambilan keputusan dan penyusunan anggaran berikutnya. Implementasi kebijakan di daerah masih sangat bergantung pada desain dari pemerintah pusat. Banyak kebijakan tidak memberikan ruang yang cukup bagi pemerintah daerah untuk berinovasi atau menyesuaikan kebijakan dengan konteks lokal.

Ketergantungan ini sering mematikan inisiatif lokal dan memperlambat proses adaptasi kebijakan terhadap dinamika lokal. Padahal, prinsip desentralisasi menghendaki adanya otonomi daerah yang lebih luas dalam pengambilan keputusan. Sejalan dengan konsep adaptive governance.²¹ Seharusnya daerah diberi ruang lebih besar untuk

²⁰Fung, Archon. Varietas partisipasi dalam tata kelola yang kompleks. *Tinjauan administrasi publik*, 2006, 66: 66-75.

menyesuaikan kebijakan dengan kapasitas lokal, terutama dalam kondisi darurat seperti pandemi atau bencana alam.

D. PENUTUP

Program makan bergizi gratis tidak hanya berfungsi sebagai intervensi sosial untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan gizi masyarakat, terutama anak-anak dan pelajar, tetapi juga membuka peluang strategis untuk memperkuat sektor ekonomi kerakyatan. Dengan melibatkan UMKM pangan sebagai mitra penyedia makanan dalam skema program ini, pemerintah dapat mendorong tumbuhnya permintaan stabil yang berdampak langsung pada peningkatan kapasitas produksi, omzet, dan daya saing pelaku usaha kecil. Lebih jauh, program ini dapat memperkuat ekosistem ekonomi lokal melalui penciptaan lapangan kerja, penggunaan bahan baku lokal, dan peningkatan keterlibatan perempuan dalam ekonomi produktif. Namun demikian, untuk memastikan keberlanjutan dan dampak positifnya, diperlukan desain kebijakan yang menyeluruh, termasuk sistem pengadaan yang berpihak pada UMKM, pengawasan mutu yang terjangkau, dan kemitraan yang adil antara pelaku usaha dan pemerintah. Dengan perencanaan yang matang dan kolaborasi lintas sektor, program makan bergizi gratis memiliki potensi besar sebagai motor penggerak ekonomi kerakyatan yang tidak hanya menyehatkan generasi penerus bangsa, tetapi juga memberdayakan ekonomi masyarakat dari bawah secara nyata dan berkelanjutan.

DAFTAR RUJUKAN

- Alim, Zaid Hafizhun. *Implementasi SDGs Oleh UNDP Indonesia Melalui Program Smile di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19 (2019-2023)*. 2025. Universitas Islam Indonesia.
- Dwiyanto, Agus. *Manajemen pelayanan publik: peduli inklusif dan kolaborasi*. UGM press, 2018.
- Fung, Archon. Varietas partisipasi dalam tata kelola yang kompleks. *Tinjauan administrasi publik*, 2006, 66: 66-75.
- Guba, Egon G., dkk. Paradigma yang bersaing dalam penelitian kualitatif. *Buku Pegangan Penelitian Kualitatif*, 1994, 2.163-194: 105.
- Kemenkes, R. I. Profil kesehatan Indonesia tahun 2019. *Kementerian Kesehatan Republik Indonesia*, 2019, 42.4: 1.
- Mamulaty, Arjun; Rengifurwarin, Zainal Abidin; Normawati, Normawati. Analisis Implementasi Kebijakan Penurunan Stunting di Desa Wamsisi Kecamatan Waesama Kabupaten Buru Selatan. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 2024, 5.1: 587-601. <https://doi.org/10.55681/jige.v5i1.2399>
- Manongga, D., Rahardja, U., Sembiring, I., Lutfiani, N., & Yadila, A. B. (2022). Pengabdian masyarakat dalam pemberdayaan umkm dengan melakukan implementasi website

- menggunakan plugin elementor sebagai media promosi. *ADI Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 44-53.
- Miles, Matthew B., et al. F. Analisis Data. *Implementasi Kurikulum Merdeka Di Sekolah*, 1996, 61.
- Mita, Desi Syaras; TAMBUNAN, Linda Rosmery; Izzati, Nur. Analisis kemampuan pemecahan masalah peserta didik dalam menyelesaikan soal PISA. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Matematika*, 2019, 1.2: 25-33.
- Neuman, Delia. Penelitian kualitatif dalam komunikasi dan teknologi pendidikan: Pengantar singkat tentang prinsip dan prosedur. *Jurnal Komputasi dalam Pendidikan Tinggi*, 2014, 26.1: 69-86.
- Patton, Michael Quinn. Dua dekade perkembangan dalam penyelidikan kualitatif: Perspektif pribadi dan pengalaman. *Pekerjaan sosial kualitatif*, 2002, 1.3: 261-283.
- Prasetyo, Nisrina Hani; Firmansyah, Dani. Analisis kemampuan berpikir kritis matematis siswa kelas VIII dalam soal high order thinking skill. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 2022, 8.1: 271-279.
- Purnomo, Eko Priyo, dkk. Tanggapan kebijakan ASEAN terhadap pandemi COVID-19: Kebijakan adaptasi dan eksperimen: Studi tentang volatilitas kebijakan negara-negara ASEAN untuk pandemi COVID-19. *Sage Terbuka*, 2022, 12.1: 21582440221082145.
- Rodríguez-Pose, Andrés; HARDY, Daniel. Mengatasi kemiskinan dan ketimpangan dalam ekonomi pedesaan dari perspektif global. *Geografi Terapan*, 2015, 61: 11-23. <https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2015.02.005>
- Ross, Florian. Kate Raworth-Ekonomi Donat: Tujuh cara berpikir seperti ekonom abad ke-21 (2017). *Studi regional dan bisnis*, 2019, 11.2: 81-86. <https://doi.org/10.33568/rbs.2409>
- Setiabudi, Didit; ANGGRAINI, Dewi. Strategi Pengembangan Kompetensi Pegawai di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). *International Journal of Social and Public Administration*, 2021, 1.1.
- Sumberg, James; SABATES-WHEELER, Rachel. Linking agricultural development to school feeding in sub-Saharan Africa: theoretical perspectives. *Food Policy*, 2011, 36.3: 341-349. <https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2011.03.001>
- Tang, Kwok-Cho, dkk. Sekolah untuk kesehatan, pendidikan dan pembangunan: seruan untuk bertindak. *Promosi kesehatan internasional*, 2009, 24.1: 68-77. <https://doi.org/10.1093/heapro/dan037>
- Wardana, Ludi Wishnu, et al. Drivers of entrepreneurial intention among economics students in Indonesia. *Entrepreneurial Business and Economics Review*, 2021, 9.1: 61-74.
- WU, Qing, dkk. Model rem udara kereta barang. *Jurnal Internasional Transportasi Kereta Api*, 2023, 11.1: 1-49.